

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan penulis pada Bab IV dalam menilai kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun yaitu 2019 sampai dengan 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Salah satu organisasi milik pemerintah yang terlibat dalam pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- b) Alokasi tanggung jawab dan wewenang menunjukkan struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang sangat jelas.
- c) Rasio Likuiditas dan Solvabilitas merupakan alat analisis laporan keuangan yang digunakan di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
- d) Rasio likuiditas Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar berfluktuasi, dengan Current Ratio maksimum sebesar 4.562.961,29% yang terjadi pada tahun 2019 dan Current Ratio terendah sebesar 1.425.540,76% yang terjadi pada tahun 2021. Peningkatan terbesar pada rasio cepat (*quick ratio*) sebesar 98.268,72% dan penurunan terendah sebesar 239,00% terjadi pada tahun 2021 dan 2020.
- e) Rasio solvabilitas pada *total debt to asset ratio* juga berfluktuasi, dengan rasio terbesar sebesar 0,00032% yang terjadi pada tahun 2019 dan rasio terendah sebesar 0,00017% yang terjadi pada tahun 2020. Rasio Solvabilitas pada *total debt to equity ratio* juga berfluktuasi, yaitu sebesar 0,0003% pada tahun 2019.

Kemudian turun menjadi 0,0002% pada tahun 2020. Kemudian meningkat sekali lagi menjadi 0,0003% pada tahun 2021.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, penulis memberikan rekomendasi untuk masa yang akan datang, yaitu agar kerjasama pegawai lebih ditingkatkan terhadap pekerjaan agar tidak terjadi fluktuasi karena keterlambatan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan akan merugikan baik bagi staf maupun pegawai. Kerugian tersebut memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap pendapatan instansi.

